Perempuan Dalam Pusaran Sistem Perceraian (Pemahaman Konsep Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III
rahmatyudistiawan@yahoo.com
HP. 081214412131

Abstrak:

Fenomena tingginya perceraian di masyarakat bukan lagi suatu hal yang dapat dihindari. Banyak penyebab yang mendasari mengapa pernikahan yang sakral harus diakhiri dengan sebuah perceraian. Bila dalam keadaan suami istri lebih memilih perceraian sebagai sebuah upaya terakhir penyelesaian masalah, perspektif yang kadang kala muncul dalam Hukum Islam adalah terkait kuasa atas putusan perkawinan hanya diperuntukkan bagi laki-laki, atau hak prerogatif laki-laki. Hal ini dilandasi atas pemahaman bahwa laki-laki yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup keluarga. Lalu apakah demikian Islam memosisikan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak perceraian? Langkah interpretasi al-Quran dalam memandang posisi laki-laki dan perempuan akan haknya terhadap perceraian menjadi urgen. Di kala penyimpangan paham muncul dalam masyarakat lebih mengarah pada ketimpangan hak antara suami dan istri dalam perceraian, hal ini bisa saja dipicu oleh keterbatasan dalam memahami pesan al-Quran ketika disampaikan tentang makna kesetaraan dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan berkembangnya pemikiran terkait dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengutarakan pendapat. Dalam hal ini, tidak lagi melihat hak siapa untuk mengajukan perceraian namun melihat pada situasi yang menjadi penyebab sehingga perceraian itu dapat terjadi.

Kajian ini memberikan pemahaman bahwa istri bukan lagi pihak yang hanya menjadi obyek tetapi istri adalah pihak yang bisa bersikap mandiri dan mampu berdiri serta berjalan beriringan bersama dengan suami, untuk berjuang mempertahankan perkawinan guna tercapainya tujuan perkawinan. Namun apabila perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan maka perempuan juga memiliki posisi yang sama dalam hal hak-hak atas terjadinya perceraian, sebab perempuan memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.

A. Latar Belakang

Patriarki merupakan salah satu konstruksi yang mewarnai berbagai pemahaman dalam sistem kekerabatan di dunia Islam dulu hingga saat ini. Dahulu Arab pada zaman sebelum Nabi diutus, memiliki anak perempuan adalah bencana bagi suku, sehingga harus cepat-cepat dikubur hidup-hidup dari pada ia sengsara dan menyengsarakan keluarga.¹ Pun di Indonesia, perempuan diidentikkan sebagai objek laki-laki. Contoh simpel yang dapat diambil, berbagai tayang di televisi, siaran iklan, sinetron, film dan lain sebagainya dominasi perempuanlah yang menjadi objek tontonan. Selalu perempuan yang menjadi objeknya, dan itu yang selalu muncul dalam benak seorang laki-laki berupa gambaran yang berkonotasi ke arah negatif, seperti tubuh, fisik biologisnya yang ada dalam benak laki-laki. Ketika dibayangi oleh hal itu, tidak heran jika posisi perempuan menjadi rendah. Tugas perempuan hanya reproduksi, menghasilkan anak. Jadi setiap ada perempuan, maka sudah menjadi lumrah yang selalu terpikirkan oleh laki-laki adalah tubuh dan fisik biologisnya. Jangankan berpakaian terbuka, yang tertutup pun mungkin juga sama. Dan itulah yang menjadi masalahnya.

Padahal, ada sisi tubuh lain dari perempuan yang dinamai dengan tubuh maternal. Jadi tidak sekedar memiliki fungsi reproduksi, melainkan fungsi keibuan pun juga dimiliki, yang kadang dilupakan. Fungsi yang membentuk manusia itulah yang disebut dengan tubuh maternal. Jadi ibulah yang menjadi kunci seseorang akan menjadi seperti apa. Sejauh mana diri seorang anak nanti berkembang, sebesar itulah andil seorang ibu membentuk diri anak tersebut. Itulah jasa dari tubuh maternal seorang ibu. Dan mungkin inilah sepadan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya dengan memosisikan *maqom* ibu sebanyak tiga kali lipat lebih tinggi dari pada ayah. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah soal siapa yang mesti aku hormati dan aku hormati, ibu atukah bapak, maka jawaban Rasul ketika itu ibumu. Dan itu berulang sampai tiga kali.²

Di sisi ini, justru laki-laki sebenarnya sangat bergantung kepada perempuan, bukan sebaliknya, perempuan tergantung pada laki-laki. Karena hanya perempuanlah yang memiliki sifat mengasuh melalui tubuh maternalnya. Dan tubuh maternal ini berperan penting di saat seorang perempuan/ibu, sebagai simbol perkembangan

¹ Husein Muhammad, dkk., *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hlm. 83.

² Husein Muhammad, dkk., *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hlm. 52-53.

manusia, membentuk identitas yang akan dipilih anaknya sejak dalam kandungan hingga setelah ia keluar dari rahim ibunya. Inilah kelebihan yang seharusnya disadari bahwa perempuan adalah penentu masa depan pembangunan suatu negara.

Dari deskripsi di atas, wajar bilamana ketika seorang perempuan terutama yang termarginalkan saat ini berjuang, bersuara menuntut haknya untuk disetarakan. Dengan munculnya gerakan feminisme yang terbagi dalam tiga gelombang besar, tahap pertama disebut dengan feminisme liberal dengan menginginkan kesetaraan di segala hal, memperjuangkan hak pilih, persamaan upah, dan lain sebagainya serta mengabaikan perbedaan jenis kelamin. Dan ini merupakan gelombang awal dalam sejarah gerakan emansipasi. Cita-citanya adalah mencampurkan antara feminin dan maskulin dengan tidak mempedulikan siapa laki-laki dan perempuan, pendidikan tidak lagi melihat jenis kelaminnya, politik juga sama, kerjaan pun demikian pula, tidak ada batas yang memisahkannya. Satu-satunya yang membedakan hanya fungsi genitalnya, yaitu menyusui, hamil, melahirkan dan semacamnya.

Tahap kedua disebut dengan feminisme radikal yang menginginkan pembangunan masyarakat perempuan sebagai tandingan masyarakat patriarki. Perempuan harus merebut kembali kuasa atas tubuh mereka sendiri. Jalan yang diambil antara lain menjadi feminis lesbian. Tahap yang terakhir disebut dengan feminisme postmodern yang menyadari keragaman latar budaya dan ras. Tidak mengutamakan satu identitas tertentu, mendorong eksistensi yang paralel, menggabungkan pendekatan feminisme sebelumnya, memungkinkan perbedaan individual untuk tetap ada tanpa menjadi kehilangan kefeminisannya. Artinya, jangan ada sikap atau pun perlakuan yang mengarah kepada diskriminasi terhadap jenis, ras, suku dan golongan tertentu, karena kesemua itu adalah ragam kehidupan, termasuk kalangan yang bukan laki-laki maupun perempuan. Ekspresikan sesuai kebenaran masing-masing kultur, dengan menghilangkan sikap dikotomi.

Secara umum, nasib seorang perempuan di dunia ini selalu dikeluhkan sebagai pihak yang tertindas. Sehingga konstruksi dunia sejak dulu hingga saat ini terbangun atas konstruksi patriarki, dengan kedudukan laki-laki lebih tinggi derajatnya ketimbang perempuan. Budaya patriarkat memulai riwayat penindasannya terhadap perempuan dengan stigmatisasi negatif terhadap kebertubuhan perempuan. Unsur-unsur biologis pada tubuh perempuan dilekati dengan atribut-atribut patriarkat dengan cara menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah hambatan untuk melakukan aktualisasi diri. Perempuan diciutkan semata dalam fungsi biologisnya saja. Tubuh

yang sudah dilekati nilai-nilai patriarkat ini kemudian dikukuhkan dalam proses sosialisasi serta diinternalisasikan melalui mitos-mitos yang ditebar ke berbagai pranata sosial, keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan mungkin juga negara.

Perempuan diciptakan memang mengemban fungsi kewanitaannya, tetapi ia tidak hanya sebatas itu, hanya saja yang dicitrakan selama ini dibatasi pada fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, pencitraan tersebut berimplikasi kepada berbagai pemahaman agama yang salah satunya menjadi bahasan utama kali ini. Tentang perempuan dalam sistem perceraian. Kuasa talak atau putusnya perkawinan dalam Islam jelas diatur hanya diperuntukkan bagi laki-laki, atau hak prerogatif laki-laki. Bilamana perempuan yang mengajukan gugatan cerai, maka cap yang diterima oleh perempuan yang menggugat cerai tanpa alasan yang jelas haram baginya mencium bau surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: "Disampaikan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, dikisahkan kepada kami oleh Humad dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi yang dibenarkan maka haram baginya mencium udara surga." (HR. Abu Dawud)

Implikasi dari hadis di atas, terutama bagi masyarakat yang menganut ideologi patriarki, nilai perempuan yang menggugat cerai suami di mata masyarakat tidaklah menyenangkan, apalagi ketika ia berstatus janda setelah kasus gugatannya dikabulkan. Stigma umum yang sering kali dilekatkan bagi diri mereka seperti "perempuan yang tidak becus mengurus suami", "perempuan rewel", "perempuan genit" dan lain sebagainya yang memosisikan perempuan dalam kondisi yang sulit. Akibatnya perempuan tidak memiliki kebebasan untuk bertindak karena stigmatisasi tersebut. Apalagi bila ia dihadapi dengan perlakuan yang tidak menyenangkan dari suami dan ia merasa perlu melakukan penindakan.³

Inilah yang menjadi masalah utama, sebab serangkaian masyarakat masih berpegang teguh pada alasan-alasan yang meletakkan perempuan pada derajat yang lebih rendah dari laki-laki. Suami masih dianggap sebagai pemilik hak cerai sedangkan istrinya hanya semata-mata sebagai pihak yang dicerai, bahkan dikesankan tidak memiliki hak cerai. Implikasinya adalah penggunaan hak cerai yang tidak

³ Lihat Anik Farida, dkk., *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2007), hlm. 56-59. Dapat dilihat sebagai rujukan mengenai problem kekinian masyarakat yang mengalami dampak perceraian, khususnya pada sampel data penelitian yang diterangkan oleh Anik Farida pada locus penelitiannya di Tangerang.

seimbang antara suami dan istri yang akhirnya merugikan pihak istri. Hal tersebut menjadi problem yang mendiskreditkan Islam sebagai agama yang menciderai keadilan dan itu menjadi urgen untuk dikaji, sebab apakah al-Quran sebagai landasan berpijak umat Islam berbicara soal posisi perempuan dalam putusnya perkawinan.

B. Pembahasan

Tafsir-tafsir yang beredar selama ini, dan berbagai bunyi hadis serta kajian fikih yang disuguhkan, banyak yang ditulis oleh para ahli atau mujtahid di kalangan laki-laki. Sedikit bahkan nihil kiranya dari pihak perempuan yang menulis atau berkarya di bidang ilmu tafsir, fikih dan lainnya. Sehingga dapat dimungkinkan hasil-hasil dari karya para mujtahid tersebut menguntungkan kalangan laki-laki, dan tidak terlalu peka terhadap perempuan.⁴ Inilah akar permasalahannya, maka budaya semacam ini perlu dimodifikasi. Simone De Beauvoir pernah menyatakan “*One is Not Born, but Rather Becomes a Woman*” perempuan itu tidak dilahirkan, tetapi dibentuk. Artinya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah bentukan, bukan kodrat atau takdir.

Budaya yang membentuk perempuan, memberikan pengertian bahwa perempuan dibentuk berdasarkan kondisi sosial. Masyarakatlah yang mendidik seorang perempuan harus begini atau begitu, sebagaimana laki-laki harus begini atau begitu. Dan bentukan ini dibangun sejak kecil, ketika perempuan misal hanya dibolehkan bekerja di sekitar dapur, sumur dan kasur. Mereka dibentuk berdasarkan kondisi sosial di mana ditanamkan nilai bahwa seorang perempuan haruslah bersikap lembut, jinak, malu-malu, pengabdian, setia, pasrah, dan pasif. Sementara, laki-laki harus menjadi seorang pengambil keputusan, pengambil inisiatif, bertanggungjawab, dan berkuasa. Contoh seorang anak laki-laki sejak bayi dipilhkan ibunya baju berwarna maskulin seperti biru, perempuan dipilhkan yang berwarna merah muda. Struktur sosial lah yang sebenarnya membentuk perempuan, dan punya andil besar terhadap inferioritas perempuan. Akibatnya bagi perempuan? Perempuan akan selalu berpikir, berbicara, dan menjalankan hidup sebagai “perempuan”. Citra yang semacam ini akhirnya berpengaruh pada cara pandang kehidupan yang mentradisi dalam budaya maupun paham agama.

⁴ Husein Muhammad, dkk., *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hlm. 171-172.

Untuk itu, dimulai dari memahami dan mereinterpretasi landasan hukum yang berbicara soal cerai gugat. Dengan mengkaji dasar hukum cerai gugat yang ada dalam al-Quran. Dalam Quran surat al-Baqarah ayat 229, Allah swt. berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(al-Baqarah: 229)

Muhammad Nasib ar-Rifai menjelaskan tentang ayat di atas bahwa apabila suami istri berselisih, istri tidak memberikan hak suami, istri membencinya, dan ia tidak mampu menggaulinya maka istri harus menebus dirinya dari suaminya dengan maskawin yang dulu diberikan oleh suaminya, dan penyerahan itu boleh dilakukan si istri, dan suami pun tidak salah mengambil tebusan dari mantan istrinya.⁵

Ayat ini searah dengan bunyi hadis yang menceritakan kisah sahabat Sabit bin Qais, yang diriwayatkan al-Bukhari, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban tentang kasus istrinya yang mengadukan perihal dirinya kepada Rasulullah saw. Setelah Rasulullah saw. mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah saw. bertanya: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)?” Istri Sabit menjawab: “Mau”. Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Sabit bin Qais: “Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali.”⁶

Berdasarkan hadis tersebut, tuntutan yang diajukan karena istri merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Sabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni: “Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan suaminya. Agar kondisi tersebut tidak

⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Penerjemah Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 375.

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 932; M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa Muammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003), hlm. 303.

berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Sabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti itu, menurut Ibnu Qudamah, ahli fikih Mazhab Hanbali, keduanya lebih baik bercerai.⁷

Dari ayat di atas menurut penulis istilah *fida* digunakan untuk menggambarkan tentang cerai gugat melalui penggunaan istilah tebusan, dengan redaksi kalimat *fimaftadat bihi*.⁸ Makna ini kemudian sejalan dengan istilah dalam fikih disebut dengan *khulu* yang dalam pandangan *jumhur ulama* berarti pelepasan ikatan perkawinan antara suami-istri dengan ganti rugi atau tebusan (dalam bahasa fikih disebut dengan *iwadh*).⁹ Maka bila istri ingin menggugat cerai suami, syarat utamanya berdasarkan kesepakatan antara suami-istri dan mengembalikan mahar kepada suami sebagai tebusan.¹⁰

Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraian menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang sebelumnya berhak menerima (dalam hal ini istri) kini bersedia membayar kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yakni suami. Ini berarti telah terjadi penjungkirbalikan keadaan sehingga surga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Karena itu, melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian.¹¹

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa cerai gugat mengharuskan perempuan untuk menebus dirinya? Ternyata hal ini didasari atas redaksi sebuah hadis yang menyatakan bahwa istri bagaikan tawanan bagi suami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: “*Hendaknya kalian berwasiat yang baik untuk para wanita karena mereka sesungguhnya hanyalah tawanan yang tertawan oleh kalian.* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 932.

⁸ M. Quraish Shihab, dkk. (ed.), *Ensiklopedia Al-Quran; Kajian Kosakata Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 228.

⁹ Wahbah as-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 418.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 230.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 495.

Yang menjadi masalah kemudian adalah bentuk penerapan, bagaimana bila tuntutan atas cerai gugat dilandasi atas dasar penganiayaan dan penindasaan yang dialami pihak perempuan, baik fisik maupun psikis sedangkan istri dituntut untuk membayar *iwadh* atau tebusan? Walaupun hak yang dimiliki sama, yaitu sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai, namun di sisi lain bila ditinjau sekilas dari berbagai landasan hukum di atas, letak ketimpangan masih seiring terjadi bagi perempuan dengan membebankannya untuk menebus dirinya dan tidak bagi sang suami atau pihak laki-laki. Sebab bila diikuti perkembangan sejauh ini, tidak mustahil bilamana suami dengan semena-mena melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Bukan hal yang tabu lagi menyaksikan kejadian istri ditinggalkan selama berbulan-bulan oleh suami dengan alasan memperbaiki kehidupan, padahal yang dilakukan berkebalikan dengan apa yang dijanjikan, bilamana nafkah anak dan istri tidak berjalan lancar akhirnya menjadikan pihak istri pontang-panting memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sama halnya dalam Hukum Islam, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, telah mengatur terkait dengan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami, di mana istri dapat meminta kepada hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkawinannya, yang dikenal dengan istilah cerai gugat. Hal ini memperlihatkan bahwa negara telah memberikan perhatian khusus kepada istri guna menghindari ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Belum lama ini Mahkamah Agung juga melalui Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang tujuannya untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Kata Pengantar Ketua Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, lahirnya Perma tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung untuk membentuk standar bagi Hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, khususnya dalam sistem perceraian.

Perceraian tidak lagi memiliki pengertian sempit sebagai bentuk putusanya perkawinan karena jatuhnya talak suami pada istri, namun istri juga diberikan hak yang sama untuk mengajukan perceraian kepada suaminya. Perlu dipahami bahwa jatuhnya keputusan cerai bukan disebabkan oleh hak perseorangan, melainkan hak akan situasi nyata yang terjadi, sehingga dapat dipahami bahwa putusanya perkawinan akan dapat ditetapkan bukan karena itu hak laki-laki atau perempuan namun melihat indikasi apa saja yang diajukan dan dibuktikan di depan persidangan.

Dalam prakteknya ada klasifikasi terkait dengan putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri, yaitu dibedakan antara cerai gugat *faskhi* dan cerai gugat dengan jalan *khulu*. Klasifikasi ini sebenarnya didasari pada perbedaan penyebabnya atau indikatornya yang diutarakan salah satu pihak atau berdasarkan pada kasus yang berbeda dalam pengajuan perceraian. *Pertama*, cerai gugat *faskhi* yang diajukan oleh istri yang berdasarkan atas alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, seperti: *mafqud*, penjara, KDRT, tidak sanggup memberikan nafkah, perselisihan yang terus-menerus dan murtad.

Kedua, adalah cerai gugat dengan jalan *khulu*, ini adalah praktek cerai gugat yang paling banyak ditemui dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, di mana istri harus membayar *iwadh* atau tebusan kepada suami, alasan yang melatarbelakangi cerai ini adalah pelanggaran taklik talak, putusan hakim terkait dengan alasan perceraian yang bersumber dari istri itu sendiri. Untuk itu perlu diperhatikan bahwa, pada dasarnya semua ketentuan ini berdasarkan pada unsur-unsur tertentu yang memberikan implikasi terhadap putusnya perkawinan.

Hal ini berimplikasi bahwa istri memiliki wewenang untuk dapat memaksa suami menjatuhkan talak melalui putusan hakim. Melihat kondisi masyarakat era modern saat ini yang membebaskan semua orang untuk berpendapat dan membuka paradigma untuk menjadi lebih realistis dalam menjalani hidup. Perkawinan tidak lagi sebagai pelabuhan hidup di mana istri bersandar secara utuh kepada suami, akan tetapi istri dapat memiliki hak untuk bekerja secara profesional di luar rumah demi kebutuhan diri dan untuk membantu ekonomi keluarga.

Artinya, pada konteks ini, istri tidak lagi hanya sebagai objek, akan tetapi juga dapat menjadi partner di dalam rumah tangga. Dengan kata lain istri tidak hanya menjadi pihak yang diceraikan, tetapi istri dapat menjadi pihak yang mengajukan gugatan agar dapat bercerai dan dapat memaksa suami untuk menjatuhkan talak padanya. Sehingga talak bukan lagi menjadi hak prerogatif suami yang secara semena-mena dapat ia jatuhkan kepada istrinya.

Implikasi dari evolusi paradigmatik yang terbangun pada diri para perempuan (istri) saat ini adalah, rasa yang sama untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka. Termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Sehingga makna perkawinan bertransformasi dari yang awalnya digambarkan sebagai kepemilikan suami terhadap istri menjadi perkawinan yang bersifat *equal* (seimbang) dengan tugas masing-masing yang harus dijalankan demi keutuhan rumah tangga. Tidak ada lagi istilah perintah,

tapi yang ada adalah musyawarah. Tidak ada lagi istilah menekan, akan tetapi yang ada adalah istilah kebersamaan. Dengan kelebihan akal pikiran yang diberikan Allah swt. kepada laki-laki, maka suami berfungsi untuk membimbing perjalanan rumah tangga, dan istri sebagai seorang perempuan yang dilebihkan oleh Allah kekuatan hati, maka ia memiliki tugas untuk mengingatkan anggota rumah tangganya tentang kebaikan dan keburukan, dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan perceraian, dengan prinsip kesetaraan tersebut, maka perceraian tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami. Akan tetapi juga menjadi hak seorang istri dengan alasan-alasan yang harus dikemukakan di hadapan persidangan. *Nash-nash* yang menggambarkan tentang keburukan seorang istri meminta cerai suaminya juga harus di reinterpretasi oleh para pemikir hukum Islam.

Perlu dijelaskan bahwa istri dalam konteks Arab-Islam adalah sosok yang harus memiliki ketaatan yang mutlak terhadap suaminya, dan untuk membenarkannya maka dihadirkan dalil-dalil agama baik al-Qur'an maupun Hadis. Seperti misalnya *nash* yang menjelaskan bahwa jika seorang suami meminta untuk berhubungan seksual dengan istrinya, namun istrinya menolak, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi. Tekstualitas hadis tersebut harus dibaca melalui pendekatan budaya, di mana konteks budaya Arab yang menghormati perempuan sangat *overprotective*, sehingga perempuan tidak mendapat tempat untuk memilih kebutuhan rumah tangga di pasar, karena sudah dibelanjakan oleh suaminya, bahkan memasak pun dibantu oleh para pembantu (dahulu dikenal dengan budak).¹²

Oleh karena itu, dengan mengembalikan asas-asas perkawinan ke dalam budaya serta hukum di Indonesia. Maka pengertian perkawinan semestinya menjadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui asas personalitas keislaman, sukarela, kemitraan, ikatan selama-lamanya dan lain sebagainya, maka konstruksi hukum perkawinan bukan lagi dimaknai yang satu menguasai yang lain, tetapi ditujukan untuk membangun interelasi (berpasangan/*partnership*) suami-istri demi mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹³ Al-Quran pun mengamini hal

¹² Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami; Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, Manado: IAIN Manado Press, 2015, hlm. 99.

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 94-106.

tersebut dengan menjabarkannya dalam surat an-Nahl ayat 72, ar-Ruum ayat 21 dan Fathir ayat 11, Allah swt. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu **pasangan** dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?” (an-Nahl: 72)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (ar-Ruum: 21)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu **berpasangan**. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam Kitab . Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah” (Fathir: 11)

Untuk mencapai hal tersebut maka kesetaraan relasi menjadi hal yang perlu diperhatikan, dengan beberapa pola relasi yang saling mengikat antara suami dan istri berupa hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab masing-masing dari suami-istri dalam hal mempertahankan pencapaian tujuan rumah tangga. Namun, jika pasangan suami istri dilanda musibah yang mengakibatkan retaknya hubungan di antara mereka, terutama bila didalangi oleh sang suami yang menyebabkan istri merasa frustrasi dalam menjalani bahtera rumah tangga. Maka apakah akan menjadi berdosa kiranya, jika selaku istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama bila nyatanya ia merasa tidak dihargai, dihina, diacuhkan bahkan dilecehkan oleh suami? Karena pada dasarnya tidaklah mudah seseorang mengambil keputusan untuk bercerai tanpa sebab. Perlu diingat bahwa mempertahankan keluarga yang tidak harmonis sama saja mempertahankan penyakit dalam tubuh. Ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan:

Artinya: “Mencegah lebih baik dari pada mengobati”.¹⁴

Penerapan kaidah ini nampak, ketika dikaitkan dengan masalah di atas dengan bentuk perlindungan bagi perempuan dari “kerusakan” yang disebabkan atas akibat yang timbul dari alasan-alasan perceraian, seperti kekerasan dalam rumah tangga, suami yang enggan memberi nafkah, perselingkuhan dan lain sebagainya, sehingga ketika istri dihadapkan dengan “kerusakan-kerusakan” semacam itu mampu menyikapinya dengan mengambil keputusan, yaitu misalnya dengan mengajukan gugatan cerai. Dan inilah bentuk kemaslahatan yang bisa dielukan sebagai interpretasi yang solusional dalam menghilangkan stigma buruk bagi perempuan ketika mengajukan gugatan cerai seperti yang berkembang selama ini, yang cenderung timpang dalam memosisikan perempuan. Namun perlu menjadi perhatian adalah bagaimana perkawinan tersebut dapat dipahami sedemikian rupa oleh masing-masing pasangan, sehingga tidak mudah untuk menyatakan cerai kepada pasangannya. Setidaknya jangan sampai *khulu* dijadikan sebagai wadah atau ajang main-main.

C. Kesimpulan

Melalui tulisan ini penulis berusaha mengungkap stigma perempuan dalam masyarakat yang masih berpegang pada sistem patriarki. Yang selalu memahami bahwa suami adalah penguasa bagi keluarganya, memiliki segalanya, dan berhak untuk melakukan kehendaknya. Hal tersebut melahirkan dan membentuk struktur sosial di masyarakat dengan anggapan bahwa laki-laki lebih unggul ketimbang perempuan. Dengan pembiaran hal semacam itu untuk membentuk suatu budaya maka akan berdampak pada pengaruh konstruksi sistem dan norma di masyarakat khususnya pada bidang hukum keluarga Islam.

Kepemimpinan yang didasarkan atas kriteria keunggulan laki-laki sesungguhnya sesuatu hal yang relatif dan sangat terkait dengan konstruksi sosial budaya suatu masyarakat, khususnya gambaran masyarakat di era Nabi. Pendasaran ketentuan pada konstruksi sosial tidak mungkin bisa diberlakukan secara tetap dan final, karena ia berdiri di atas sesuatu yang memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan. Perubahan sosial yang terlihat saat ini menunjukkan hak asasi, kemaslahatan dan kesetaraan gender menjadi hal yang utama dalam menentukan

¹⁴ Ini merupakan kaidah turunan dari kaidah asas لا ضرر ولا ضرر. Lihat Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariry, *Al-Madkhol Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah* (Amman: Dar Ammar, 1998), hlm. 141.

sebuah aturan. Dari sinilah bisa dikatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk di setarakan.

Ibnu al-Qayyim sebagaimana yang dikutip oleh Husein Muhammad dalam buku *Dawrah Fiqh Perempuan* menyatakan dengan tegas bahwa “Syariah adalah keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kearifan. Maka pada konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan tidak adanya diskriminasi, tidak ada kecenderungan ke arah jenis kelamin tertentu dan pengabaian jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah dan berada di bawah dominasi dan kekuatan laki-laki. Pada saat yang sama, keadilan tidak juga memberi kesempatan laki-laki untuk berbuat seperti penguasa yang mempunyai hak penuh atas diri perempuan. Keadilan memang tidak menafikan perbedaan di antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan itu, dijadikan alasan untuk membeda-bedakan apalagi mendiskreditkan. Inilah konklusi yang mesti diaplikasikan terkait dengan posisi perempuan dalam menyikapi putusnya perkawinan. Perlu diingat, bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam melalui baginda Rasulullah saw., sehingga selaku manusia jangan sampai merusak indahnya kasih sayang yang dibawa dan diajarkan dalam Islam pada segala aspek tanpa terkecuali.

Daftar Pustaka

- Al-Hariry, Ibrahim Muhammad Mahmud, *Al-Madkhol Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, Amman: Dar Ammar, 1998.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Penerjemah Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Erfani, *Spesifikasi Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama: Upaya Modifikasi Penerapan Hukum Putusnya Perkawinan karena Perceraian*, 2011.
- Farida, Anik, dkk., *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2007.

- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, Husein, dkk, *Dawrah Fiqh Perempuan; Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Rajafi, Ahmad, *Cerai Karena Poligami; Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, Manado: IAIN Manado Press, 2015.
- Shihab, M. Quraish, dkk. (ed.), *Ensiklopedia Al-Quran; Kajian Kosakata Jilid 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.